



## Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik, *Good Governance* Dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah

**Neneng Karlina**

Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia

Email: [hbsama62@yahoo.com](mailto:hbsama62@yahoo.com)

**Trisna Sary Lewaru**

Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia

Email: [eka\\_lewa@yahoo.com](mailto:eka_lewa@yahoo.com)

**Dwi Kriswantini**

Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia

Email: [kriswantini@gmail.com](mailto:kriswantini@gmail.com)

Korespondensi penulis : [hbsama62@yahoo.com](mailto:hbsama62@yahoo.com)

**Abstract.** *This study aims to determine, and obtain empirical evidence about the effect of public sector financing, good governance and internal control on government performance in OPD South Buru district on Maluku Province. The population in this study is the employees who work in Regional Apparatus Organization (OPD), in South Buru Regency, Maluku Province. This research models uses descriptive quantitative, with data sources in the form of primary data. The sample used in this study was selected through the purposive sampling method with a total sample of 100 respondents. Hypothesis testing in this study using multiple linear regression analysis with the help of SPSS version 16. The results of the study show that the results of the public accounting sector and good governance have a significant effect on the performance of government agencies in South Buru Regency. Whereas, internal control does not have a significant impact on the performance of government agencies in South Buru Regency, on Maluku Province.*

**Keywords:** *Public Sector Accounting, Good Governance, Internal Control and Performance Government*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, dan mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh akuntansi sektor publik, *good governance* dan pengawasan internal terhadap kinerja Instansi pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku. Model penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, dengan sumber data berupa data primer. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini dipilih melalui metode *purposive sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda, dengan bantuan SPSS versi 16. Dari hasil analisis diketahui bahwa akuntansi sektor publik dan *good governance* berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah pada Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku. Sedangkan, pengawasan internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah pada Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku.

**Kata Kunci:** Akuntansi Sektor Publik, *Good Governance*, Pengawasan Internal, dan Kinerja

## PENDAHULUAN

Di Indonesia sektor publik menjadi serotan masyarakat umum dimana pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewajiban yang diberikan diharapkan dapat memenuhi harapan dari masyarakat terutama dalam menjalankan pelayanan publik dengan baik.

Nugroho (2016) menyatakan bahwa perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia semakin pesat terutama dalam pelaksanaan kebijakan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas dan potensi daerah tersebut.

Peranan akuntansi sektor publik ditujukan untuk memberikan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan publik. Keberhasilan dalam suatu pelayanan publik salah satunya dapat diukur dari akses pelayanan publiknya. Contohnya jika suatu daerah tidak bisa mendapatkan pelayanan dasar yang seharusnya bisa diterima oleh masyarakat maka hal tersebut akan berdampak pada kesejahteraan seluruh masyarakat oleh karena itu peran pemerintahan sangat penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Oleh karenanya, diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Asmawanti (2020) menyebutkan bahwa *good governance* memaknai upaya pemerintah untuk mengelola proses pengambilan keputusan dengan membuka ruang leluasa dan melibatkan peran masyarakat, sehingga terciptanya sebuah transparansi kinerja. Transparansi tersebut menciptakan suatu indeks penilaian terhadap akuntabilitas suatu instansi, sementara akuntabilitas instansi mencakup pengungkapan dan pertanggungjawaban dari pihak-pihak terkait baik berupa tindakan, laporan finansial hingga keputusan yang diambil oleh instansi.

Hal ini dapat dilihat pada pelaksanaan pembangunannya. Dikutip oleh Ibrahim (2015) pelaksana pembangunan harus mengarah kepada penciptaan *good governance* yang diterjemahkan sebagai "Tata Kelola Pemerintahan yang Baik." Timbulnya konsep *good governance* karena adanya tidak puas pada kinerja pemerintahan yang selama ini dipercaya sebagai penyelenggara urusan publik.

Mardiasmo (2016) mengungkapkan dalam rangka mewujudkan *good governance* dilingkungan pemerintah daerah, pemerintah seharusnya melakukan reformasi dalam segala aspek pengelolaan daerah. Dimensi sektor publik tersebut tidak saja sekedar perubahan format lembaga, akan tetapi mencakup pembaharuan alat-alat yang digunakan untuk berjalannya lembaga-lembaga publik tersebut secara transparan, akuntabilitas dan partisipasi (*good governance*) serta didukung dengan adanya gaya kepemimpinan yang bagus selain

melalui *good governance*, kinerja pemerintah juga membutuhkan pengawasan internal yang baik.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengenai Sistem Pengendalian Internal menyatakan bahwa Pemerintah Daerah perlu mengadakan suatu pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengawasan internal dilakukan sebagai upaya menunjang dan memperkuat efektivitas pelaksanaan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) guna menanggulangi kemungkinan terjadinya penyimpangan pengelolaan keuangan daerah, Dengan demikian perlu adanya pengawasan untuk memperkecil timbulnya penyimpangan tersebut.

Pada pemerintahan Buru Selatan dikutip dari sumber *Inspektorat.Slemankab.go.id* tahun 2019 masih banyak ditemukan penatausahaan uang persediaan yang tidak tertib, pemungutan dan pelaporan pajak kendaraan bermotor yang belum memadai, dan pengelolaan belanja hibah serta bantuan sosial yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara umum pengendalian di Kabupaten Buru Selatan belum berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan internal yang dilakukan serta kurangnya kinerja yang dilakukan pada pemerintah Kabupaten Buru Selatan.

Berdasarkan informasi yang bersumber dari <https://regional.kompas.com> pada 28 januari 2022 bahwa penyidik komisi pemberantas korupsi (KPK) memeriksa belasan pejabat pemerintah Kabupaten Buru Selatan terkait kasus dugaan penerima suap pembangunan sebesar 10 Milyar pada proyek infrastruktur. Hal ini tentunya akan berdampak pada keterlambatannya pembangunan di Kabupaten Buru Selatan. Melihat seringnya terjadi berbagai kasus-kasus pelanggaran maka perlu penerapan *good governance* yang didukung oleh pengawasan internal yang baik agar dapat meminimalisir penyimpangan yang terjadi pada suatu organisasi.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik, *Good Governance* dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah”.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan objek penelitiannya adalah kinerja instansi pemerintah Kabupaten Buru Selatan. Populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai yang bekerja pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Kabupaten Buru Selatan. Sampel ditentukan dengan metode *purposive sampling* dengan tujuan untuk

mendapatkan sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian. Kriteria dalam pengambilan sampel, adalah sebagai berikut :

1. Aparatur pemerintah yang menduduki jabatan seperti kepala dinas, kepala bagian, dan kepala sub bagian.
2. Pegawai yang turut serta secara langsung dalam penyusunan anggaran dan yang terlibat dalam pelaporan keuangan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki masa kerja maksimal 1 tahun di masing-masing OPD.

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer yaitu data penelitian yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari sumber asli (tanpa perantara). Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner yang diukur dengan skala likert. Untuk menguji hipotesis digunakan analisis regresi linier berganda dengan terlebih dahulu melakukan uji asumsi klasik. Dan dari hasil uji asumsi klasik yang dilakukan diketahui bahwa data yang diperoleh telah terdistribusi normal, tidak terjadi multikolinearitas, dan tidak memiliki gejala adanya heteroskedasitas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil uji statistik maka hasil analisis regresi linear berganda dapat di lihat pada tabel berikut:

**Tabel 1. Regresi Linier Berganda**

| Model      | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | T     | Sig. |
|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
|            | B                           | Std. Error | Beta                      |       |      |
| (Constant) | 7.702                       | 1.995      |                           | 3.860 | .000 |
| AKTSP      | .517                        | .094       | .512                      | 5.490 | .000 |
| GOOD       | .250                        | .079       | .285                      | 3.158 | .002 |
| PENGAWAS   | -.033                       | .081       | -.035                     | -.404 | .687 |

Sumber: data olah, 2023.

Dari hasil uji menggunakan regresi linier berganda maka diketahui bahwa :

### 1. Hipotesis Pertama (H1)

Berdasarkan tabel 1 diatas diketahui bahwa tingkat signifikan dari variabel akuntansi sektor publik sebesar 0,000 yang menunjukkan bahwa nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat dinyatakan bahwa, H<sub>1</sub> diterima yang berarti akuntansi sektor publik berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah, di Kabupaten Buru Selatan.

## 2. Hipotesis Kedua (H2)

Berdasarkan tabel 1 diatas diketahui bahwa tingkat signifikan dari variabel *good governance* 0,002 yang menunjukkan bahwa nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat dinyatakan bahwa, H<sub>2</sub> diterima yang berarti *good governace* berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah, di Kabupaten Buru Selatan.

## 3. Hipotesis Ketiga (H3)

Berdasarkan tabel 1 diatas diketahui bahwa tingkat signifikan dari variabel pengawasan internal 0,687 yang menunjukkan bahwa nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dinyatakan bahwa, H<sub>3</sub> tidak diterima yang berarti pengawasan internal tidak berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah, di Kabupaten Buru Selatan.

Sedangkan berdasarkan hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai sebagai berikut :

**Tabel 2. Hasil Koefesien Determinasi**

**Model Summary<sup>b</sup>**

| Model | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1     | .724 <sup>a</sup> | .524     | .509              | 2.30092                    |

Sumber: data olah, 2023

Dari hasil perhitungan menggunakan program SPSS versi 16 dapat diketahui bahwa koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,524. Hal ini berarti 52,4% kinerja instansi pemerintah di pengaruhi oleh akuntansi sektor publik, *good governance* dan pengawasan internal sedangkan sisanya yaitu 47,6 % kinerja instansi pemerintah dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil analisis diatas diketahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari penerapan akuntansi sektor publik pada kinerja instansi pemerintah Kabupaten Buru Selatan. Untuk itu pemerintah Buru Selatan harus melakukan kegiatan pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan cara memperbaiki tata kelola penyelenggaraan berdasarkan regulasi yang telah ditetapkan terutama penerapan sistem akuntansi. Hal ini akan berdampak pada terciptanya *good governance*. Karena berdasarkan hasil analisis diatas diketahui bahwa *good governance* berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah Kabupaten Buru Selatan. Hal ini dibuktikan melalui Realisasi pembangunan secara makro, baik sosial maupun ekonomi telah mengalami peningkatan yang signifikan di Kabupaten Buru Selatan. Dimana Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun 2021 berada pada posisi 1,4 juta meningkat menjadi 1,6 juta di tahun 2023. Sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan yang baik. Pada tahun 2021 sebesar 64,80 poin menjadi 65,37 poin

pada tahun 2022. [www.ambonterkini.id](http://www.ambonterkini.id). Dengan demikian, apabila pelaksanaan *good governance* pada pemerintah daerah kabupaten Buru Selatan dilaksanakan dengan baik, maka kinerja pemerintah juga akan semakin baik.

Dari Hasil penelitian ini dapat diketahui juga bahwa pengawasan internal tidak mempengaruhi kinerja instansi pemerintah Kabupaten Buru Selatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengawasan internal yang belum optimal dapat menurunkan kinerja instansi. Kinerja pemerintah sangat dipengaruhi oleh bagus tidaknya pengawasan internal yang dimiliki pemerintah daerah. Karena sistem pengawasan internal yang efektif dan efisien, secara optimal akan membawa dampak positif bagi pemerintah daerah, untuk menghasilkan kinerja pemerintah daerah yang baik. Pengawasan internal merupakan proses yang terdapat dalam organisasi dirancang untuk memberikan bahwa kegiatan yang dilakukan pemerintah telah sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Pengawasan internal pemerintah bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi sector publik berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah, *good governance* berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah, sedangkan sistem pengawasan internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah. Oleh karenanya disarankan agar dapat menciptakan *good governance* dengan cara membuat kebijakan dalam merancang program-program yang bermanfaat bagi masyarakat agar dapat terwujudnya kinerja instansi pemerintahan yang lebih baik dan efektif dalam melaksanakan rencana kerja agar dapat mencapai tujuan dari instansi, serta manfaat dari program-program bisa dirasakan oleh masyarakat.

## **REFERENSI**

- Amir, M. Y. D. L. (2014). Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan . *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 5(2), 43280.
- Asmawanti, D., Sari, A. M., Fitranita, V., & Wijayanti, I. O. (2020). Dimensi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 5(1), 85-94.
- Buka Musrembang, Soulisa sebut angka kemiskinan Bursel menurun, <https://ambonterkini.id> tahun 2023, Diakses pada 10 April 2023.

- Bastian, I. (2014). Akuntansi Sektor Publik: Lingkup Akuntansi Sektor Publik. *Jakarta: Universitas Terbuka*.
- Dea, R. N. & Tri Jatmiko, W. P. 2020 Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Pemerintah (Studi Kasus Pada SKPD Kota Semarang). *Jurnal Akuntansi Diponegoro* Vol 9 (2), 1-8.
- Diana, N. L., David Paul, E. S., & Ventje, I. 2017. Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Pemerintah Kota Kotamobagu. *Jurnal Accountability Nomor 01, 2017, 118-127, VI, 118-127*.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2018). Akuntansi sektor publik. *Jakarta: Salemba Empat*.
- Jatmiko, B. (2020). Pengaruh pengawasan internal, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Sleman (Survei pada seluruh satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Sleman). *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(2), 231-246.
- Jubaedah, E. (2007). Pengembangan *Good Govenance* Dalam Rangka Reformasi Badan Usaha Milik Negara. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 4(1), 05.
- Lintong, D. N., Saerang, D. P. E., & Ilat, V. (2017). Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Pemerintah Kota Kotamobagu. *Jurnal accountability*, 6(1), 118-127.
- Murwaningsari, E. (2009). Hubungan *corporate governance, corporate social responsibilities* dan *corporate financial performance* dalam satu continuum. *Jurnal Akuntansi dan keuangan*, 11(1), pp-30.
- Putra, D. D., Rantelangi, C., & Diyanti, F. (2022). Pengaruh transparansi, akuntabilitas dan pengendalian internal terhadap kinerja instansi pemerintah pada dinas perdagangan Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (JIAM)*, 7(1), 34-44.